

Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

Honorata Etralia Mardin^{1*}, Saryono Yohanes², Agnes Doortji Rema³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: honorataetraliamardin@gmail.com^{1*}, saryonoyohanes@staf.undana.ac.id²,
agnes.rema@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: honorataetraliamardin@gmail.com

Abstract This research aims to find out and analyze the implications of the expansion of sub-district areas on public services in Congkar District, East Manggarai Regency. This research is an empirical legal research supported by a socio-legal approach, a legislative approach and a conceptual approach using primary data and secondary data that are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that (1) the expansion of Congkar District from Sambi Rampas District has had a real positive impact in the fields of administrative services, health, education, and infrastructure (2) the factors that hinder public services in Congkar District, East Manggarai Regency that hinder public services after the expansion are the factors of funds, infrastructure facilities and human resources.

Keywords: Implications, Regional Expansion, Public Services

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pemekaran wilayah kecamatan terhadap pelayanan publik di kecamatan congkar kabupaten manggarai timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung pendekatan pendekatan sosio-legal, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemekaran Kecamatan Congkar dari Kecamatan Sambi Rampas telah memberikan dampak positif yang nyata dalam bidang pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (2) faktor Penghambat Pelayanan Publik Di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur yang menghambat pelayanan publik setelah adanya pemekaran adalah faktor dana, sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Implikasi, Pemekaran Wilayah, Pelayanan Publik

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat selaku penerima pelayanan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran berbagai urusan administrasi yang berkaitan dengan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti urusan kependudukan, penyediaan bantuan sosial, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Untuk mencapai tujuan

tersebut, salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah melakukan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah muncul sebagai salah satu respons terhadap kebutuhan lokal yang mendesak. Dalam konteks ini, pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang mendasari pemekaran daerah. Kebijakan ini berakar dari pengakuan akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Salah satu landasan hukum utama untuk pemekaran daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran atau Pembentukan wilayah atau daerah otonomi baru sudah banyak dilakukan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menekankan pentingnya desentralisasi dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada.

Berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah membuka kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mengembangkan daerahnya dan mendapatkan hak otonomi seperti memekarkan atau membentuk kecamatan. Salah satunya adalah pembentukan kecamatan Congkar. Kecamatan Congkar adalah kecamatan yang dibentuk dari adanya pemekaran kecamatan Sambi Rampas dalam wilayah kabupaten Manggarai Timur yang memiliki 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa, yang nantinya akan diteliti oleh calon peneliti.

Langkah pembentukan wilayah Kecamatan Congkar yang dimekarkan dari kecamatan Sambi Rampas ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut, sebagai hasil dari pembentukan baru dalam struktur pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan ini dalam Kabupaten Manggarai Timur, penting untuk mempertimbangkan secara cermat dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kecamatan Congkar. Hal ini bertujuan agar tidak muncul dampak negatif, melainkan justru menghasilkan efek positif yang konstruktif bagi masyarakat di Kecamatan Congkar yang baru dimekarkan.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya pemekaran kecamatan Sambu Rampas adalah kurang meratanya pelaksanaan pembangunan dan kurang efektifnya pelayanan publik. Salah satu penyebab utamanya adalah jarak yang cukup jauh antara wilayah Kecamatan Congkar dengan Kecamatan Sambu Rampas yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai juga menjadi faktor yang menghambat. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Congkar, tetapi juga dapat menyebabkan stagnasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Keterbatasan akses terhadap layanan publik berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, di mana kelompok masyarakat tertentu, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti yang lain. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas daerah.

Selain itu, pemekaran itu sendiri, meskipun diharapkan dapat memperbaiki kondisi, sering kali tidak diikuti dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang tepat, pemekaran dapat menjadi tidak efektif, dan masyarakat tetap mengalami kesulitan yang sama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung pendekatan pendekatan sosio-legal, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu implikasi pemekaran kecamatan terhadap pelayanan publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur dan faktor penghambat pelayanan publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, dokumentasi dan wawancara dengan responden sebanyak 35 orang. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*) dan tabulasi data setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Congkar

Pemekaran Kecamatan Sambi Rampas merupakan jalan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama DPRD Kabupaten Manggarai Timur dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara Dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut, Kecamatan Congkar ditetapkan sebagai wilayah kecamatan baru yang terpisah dari Kecamatan Sambi Rampas, sehingga menjadi landasan untuk perubahan administrasi wilayah.

Pemekaran ini dimaksud agar masyarakat di Kecamatan Congkar mendapatkan dan merasakan suatu dampak hadirnya kecamatan baru, serta ada pada perubahan kondisi sebelum dan sesudah pemekaran yang dilakukan khususnya dalam mendapatkan pelayanan publik.

Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang apa yang terjadi di Kecamatan Congkar sebagai kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Sambi Rampas dalam bidang pelayanan administrasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastuktur.

- **Pelayanan Administrasi**

Pelayanan administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, hingga pelayanan umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa, Implikasi dari adanya pemekaran wilayah kecamatan terhadap pelayanan administrasi di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya pendekatan pelayanan administrasi bagi masyarakat dan perangkat Desa di wilayah administrasi Kecamatan Congkar. Pemekaran membawa pelayanan administrasi lebih dekat, yang sangat membantu dalam urusan-urusan seperti laporan penduduk dan pengurusan rekomendasi bagi Pemerintah Desa serta berbagai keperluan yang berkaitan dengan pemerintah kecamatan.

- **Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu daerah. Ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai di berbagai tingkatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan peluang anak-anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Dari segi pembangunan fisik, kondisi bangunan PAUD tetap kurang baik, baik sebelum maupun sesudah pemekaran, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur PAUD. Di sisi lain, kondisi bangunan SD, SMP, SMA, dan SMK tetap baik. Pada aspek pembangunan non-fisik, program pelatihan guru yang ada di Kecamatan Congkar tetap berjalan, baik sebelum maupun sesudah pemekaran.

Terakhir, pada aspek sumber daya manusia, terjadi perubahan. Jumlah guru di Kecamatan Congkar PAUD ada 4 orang. Selain itu, terjadi penurunan jumlah guru SD, SMA, dan SMK, sementara jumlah guru SMP meningkat.

Walaupun disatu sisi pemekaran Kecamatan Congkar dari Kecamatan Sambi Rampas belum terlalu berdampak pada pembangunan di bidang pendidikan tetapi disisi lain pemekaran ini membuka kesempatan bagi tenaga pendidik atau perwakilan dari sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas sektor yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan Congkar. Ini merupakan perkembangan yang baik karena dengan keterlibatan tenaga pendidik atau perwakilan dari sekolah yang ada di Kecamatan Congkar dalam pertemuan atau rapat koordinasi yang diadakan oleh pihak Kecamatan maka kebutuhan yang belum terpenuhi untuk bidang pendidikan diberbagai tingkatan akan terpenuhi dengan mengkomunikasikan dan/atau mengkoordinasikannya dengan pihak Kecamatan.

- Bidang kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara.

Berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di bidang kesehatan yang salah satunya dilihat dari penyediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Congkar yaitu sebelum pemekaran (2019), tidak terdapat rumah sakit dan apotek, namun setelah pemekaran (2023), didirikan satu rumah sakit dan dua apotek di Kecamatan Congkar. Selain itu, jumlah Posyandu meningkat dari 26 menjadi 35, dan Pustu dari 4 menjadi 6. Dari segi kualitas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mengalami peningkatan dari "kurang puas" menjadi "puas" setelah pemekaran. Sementara itu, kondisi bangunan fasilitas kesehatan tetap dalam kondisi baik, baik sebelum maupun sesudah pemekaran, menunjukkan adanya upaya pemeliharaan yang

konsisten. Dalam aspek pembangunan non-fisik, program penyuluhan kesehatan masyarakat tetap berjalan dengan konsisten. Program Posyandu bayi, balita, dan lansia diadakan 12 kali dalam setahun, serta program perbaikan gizi untuk ibu hamil dan balita tetap dilaksanakan. Terakhir, dari segi sumber daya manusia, terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan setelah pemekaran. Jumlah perawat meningkat dari 39 menjadi 45, perawat gigi dari 2 menjadi 3, bidan dari 48 menjadi 59, apoteker dari 4 menjadi 8, dan ahli gizi dari 3 menjadi 5. Dibangunnya sebuah rumah sakit pasca pemekaran membuat pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat dan membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Congkar puas dengan perubahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa, Implikasi dari adanya pemekaran wilayah kecamatan di bidang kesehatan di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur adalah pembentukan Kecamatan Congkar telah membawa perubahan positif dalam pelayanan kesehatan. Ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan fisik atau dibukanya rumah sakit baru dan pengadaan rumah posyandu di desa-desa serta adanya apotek juga yang juga mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan.

- **Bidang Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan fondasi pembangunan suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, listrik dan air bersih sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebelum pemekaran, banyak wilayah di Kecamatan Congkar yang masih kekurangan infrastruktur dasar, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pemekaran kecamatan membawa dampak yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di wilayah yang baru dibentuk.

Desa Compang Congkar mencatat penurunan jarak akses jalan dari 54 km menjadi 17 km, yang menunjukkan pengurangan signifikan sebesar 37 km. Selanjutnya, Desa Rana Mese juga mengalami penurunan, dari 45 km menjadi 15 km, yaitu 30 km. Selain itu, Desa Compang Lawi menunjukkan penurunan jarak akses yang drastis, dari 44 km menjadi 5 km, dengan total penurunan 39 km.

Kemudian, Desa Golo Ngawan mengalami perubahan yang signifikan, di mana jarak akses berkurang dari 37 km menjadi 3 km, dengan penurunan sebesar 34 km. Di sisi lain, Desa Satar Nawang, yang merupakan ibu kota Kecamatan Congkar,

menunjukkan penurunan yang luar biasa dari 39 km menjadi 1 km, yaitu penurunan sebesar 38 km.

Selanjutnya, Desa Buti juga mengalami penurunan, dari 33 km menjadi 10 km, yang merupakan penurunan sebesar 23 km. Di samping itu, Desa Golo Pari mencatat penurunan jarak akses dari 40 km menjadi 4 km, dengan total penurunan 36 km.

Selain itu, Desa Wea juga menunjukkan penurunan signifikan, dari 37 km menjadi 3 km, yaitu penurunan 34 km. Kelurahan Golo Wangkung tidak kalah signifikan, dengan jarak berkurang dari 34 km menjadi 5 km, yang berarti penurunan sebesar 29 km. Terakhir, Kelurahan Wangkung Barat mengalami penurunan dari 32 km menjadi 6 km, yaitu 26 km.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa, Implikasi dari adanya pemekaran wilayah kecamatan di bidang infrastruktur di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur adalah bahwa pemekaran Kecamatan Congkar dari Kecamatan Sambi Rampas telah menunjukkan dampak positif pada pembangunan dan perbaikan kondisi infrastruktur yang sebelumnya kurang memadai, sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Congkar secara efektif.

Faktor Penghambat Pelayanan Publik Di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

- Dana

Dana merupakan salah satu elemen krusial dalam keberhasilan suatu pembangunan, termasuk pemekaran wilayah. Keterbatasan dana dapat menghambat berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, diketahui bahwa beberapa alokasi belanja pegawai sebesar Rp 1.104.273.652,00. Anggaran ini terealisasi sepenuhnya tanpa adanya pemotongan, yang mengindikasikan bahwa belanja pegawai merupakan prioritas utama dan terlindungi dari penyesuaian anggaran. Selanjutnya, belanja barang dan jasa sebesar Rp 511.624.000,00. Terjadi pemotongan sebesar Rp 82.394.000,00, sehingga realisasi belanja barang dan jasa menjadi Rp 429.230.000,00. Pemotongan ini menunjukkan adanya penyesuaian atau penghematan dalam pengeluaran untuk barang dan jasa. Terakhir, belanja modal sebesar Rp 154.073.100,00. Sama seperti belanja barang dan jasa, belanja modal juga mengalami pemotongan sebesar Rp 34.677.310,00, sehingga realisasi belanja modal menjadi Rp 119.395.790,00. Pemotongan ini dapat mengindikasikan penundaan atau pengurangan dalam investasi modal.

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran yang signifikan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Congkar, sementara belanja pegawai tetap utuh. Hal ini mengindikasikan adanya prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib dan mendesak, seperti gaji pegawai, sementara pengeluaran yang bersifat fleksibel atau dapat ditunda mengalami penyesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagai kecamatan baru hasil pemekaran, Kecamatan Congkar menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan dana. Ketergantungan pada sumber daya dari kecamatan induk menjadi bukti nyata akan hal ini. Regulasi yang ada, ditambah dengan minimnya anggaran daerah, menghambat kemampuan kecamatan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang esensial. Meskipun upaya pengajuan kebutuhan telah dilakukan hingga tingkat kabupaten, kenyataannya anggaran yang tersedia sangat terbatas. Keterbatasan dana ini bukan hanya menghambat pembangunan sarana prasarana, tetapi juga berdampak pada kapasitas sumber daya manusia.

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat dalam mendukung pengembangan dan pelayanan di sebuah kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, diketahui bahwa dari segi sarana dan prasarana, yang paling pertama adalah sarana. Sarana di sini merujuk pada alat dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di kecamatan. Pada kategori sarana, terdapat empat jenis fasilitas yang diukur, yaitu meja, kursi, komputer/laptop, dan printer. Jumlah meja yang tersedia adalah 8 unit, sementara kebutuhan idealnya adalah 10 unit, menunjukkan kekurangan 2 unit meja. Untuk kursi, jumlah yang tersedia adalah 30 unit, jauh di bawah kebutuhan sebanyak 50 unit, yang mengindikasikan kekurangan signifikan sebanyak 20 kursi. Ketersediaan komputer/laptop adalah 3 unit, sedangkan kebutuhan adalah 7 unit, sehingga terdapat kekurangan 4 unit. Terakhir, printer tersedia sebanyak 2 unit, sementara kebutuhan

adalah 5 unit, menunjukkan kekurangan 3 unit. Pada kategori prasarana, semua jenis fasilitas yang terdaftar, yaitu gedung kantor, area parkir, listrik, air bersih, ruang rapat, ruang pelayanan, toilet, tangga masuk, dan lopo, dinyatakan tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa prasarana dasar yang diperlukan untuk operasional kantor telah terpenuhi. Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa sarana maupun prasarana yang masih perlu diperbaiki yang ada di Kantor Kecamatan Congkar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Kantor Kecamatan Congkar sebelumnya adalah Puskesmas Watunggong, dan karena ini dulunya adalah sebuah Puskesmas, jadi ada ruang-ruangan tertentu yang masih perlu diperbaiki karena harus disesuaikan dengan penggunaannya seperti ruang rapat dan ruang pelayanan publik. Itu adalah prasarananya. Sedangkan untuk sarananya, Kantor Kecamatan Congkar masih kekurangan meja, kursi, dan laptop yang mendukung pelayanan.

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan. Berangkat dari itu, maka sangat pentinglah sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan, diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediaannya maupun kompetensinya/ kemampuannya. Dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah tingkat pendidikan dari individu yang dapat menjadi alat ukur dari kinerja kerja maupun ide-ide, serta pemikiran- pemikiran yang dapat menunjang terlaksananya suatu pekerjaan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian, diketahui bahwa jumlah pegawai dikantor Kecamatan Congkar sebanyak 24 orang diantaranya PNS berjumlah 9 orang, Staf THL sebanyak 5 orang dan tenaga sukarela sebanyak 10 orang. Pada uraian unit dalam tabel di atas Kasubag Kepegawaian belum ditempati, lalu pada Kasie Pemerintahan dan Pertanahan serta Kasie Ketenteraman dan ketertiban 1 orang. Kemudian Kasie Kesejahteraan Sosial 1 orang, Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel 1 orang dan Kasie Pelayanan Umum 1 orang. Staf PNS lain 1 orang, Staf THL 5 orang dan Tenaga Sukarela 10 orang. Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat 2 (dua) orang PNS sedangkan pada bidang lain hanya 1 (satu) orang PNS saja dan Staf Sukarela yang membantu pekerjaan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa

sumber daya Manusia di Kantor Kecamatan Congkar belum memadai. Melihat PNS hanya berjumlah 9 orang, sedangkan yang lainnya staf THL dan tenaga sukarela.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemekaran Kecamatan Congkar dari Kecamatan Sambi Rampas telah memberikan dampak positif yang nyata dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan adanya pemekaran, masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai layanan publik. Namun, meskipun pemekaran membawa manfaat, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi penghambat optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Congkar, yaitu keterbatasan dana, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan pelayanan administratif dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar pemekaran wilayah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran untuk Kecamatan Congkar guna mempercepat tersedianya dana yang diperlukan dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana serta perekrutan tenaga kerja yang memadai. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Congkar perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyosialisasikan proses pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat, sehingga pelayanan administrasi dapat berjalan lebih efektif. Sebagai pihak yang menerima layanan publik dari pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat di Kecamatan Congkar diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai aspek, agar program pembangunan dan administrasi dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Dwiyanto. *Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press,
- Ahmad Irfan, *Dampak Pemekaran kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan* (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).

- Andewi Suhartini, "*Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*", Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: (Makassar: Vol 10, No 1, 2007).
- Braselia Agusta Deliyanti Elu, *Implikasi Pemekaran Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", (Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke Delapan Belas Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fajlurrahman Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ilham Mirzaya Putra. *Pengembangan Wilayah*. Medan: CV. Prokreatif, 2023.
- M. Eza Helyatha Begouvic. (2022). *Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemekaran Kabupaten Musiwaras Utara)*. Bogor: Guepedia.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Mashur Hasan Bisri, Bramantyo Tri Asmoro, *Etika Pelayanan Publik di Indonesia*. Journal of Governance Innovation, 2019.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Manggarai Timur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembar Negara Nomor 6206. Jakarta : Sekretariat Negara
- Roy Marthen, Moonti *Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistemketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah : (Vol 19, No.2, November 2017)
- Saryono Yohanes, dkk, "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/23 Terhadap Pembangunan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*". 2024.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembar Negara Nomor 5038. Jakarta: Sekretariat Negara